

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP SYARAT PENDIDIKAN UNTUK
CALON PRESIDEN BERDASARKAN PASAL 169 HURUF (r) UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

Oleh

R. Muhammad Ibrahim

NIM. 05020420048



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Muhammad Ibrahim
NIM : 05020420048
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Syarat Pendidikan Untuk Calon Presiden Berdasarkan Pasal 169 Huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 November 2023

Saya yang menyatakan,



R. Muhammad Ibrahim
NIM. 05020420048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : R. Muhammad Ibrahim
NIM. : 05020420048
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Syarat Pendidikan
Untuk Calon Presiden Berdasarkan Pasal 169 Huruf R
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 27 November 2023

Pembimbing,



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H.

NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : R. Muhammad Ibrahim

NIM. : 05020420048

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 13 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.

NIP. 196803292000032001

Penguji II

Dr. H. Achmad Yasin, M.Ag.

NIP. 196707271996031002

Penguji III

H. Ahmad Khubby Ali Rohmat, S.Ag. M.Si.

NIP. 197809202009011009

Penguji IV

Ibnu Mardiyanto, M.H.

NIP. 198703152020121009

Surabaya, 27 Desember 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Ibnu Mardiyanto, M.H.

NIP. 198703152020121009



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : R. Muhammad Ibrahim
NIM : 05020420048
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : 05020420048@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

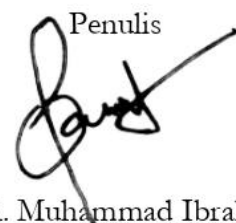
TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP SYARAT PENDIDIKAN UNTUK CALON
PRESIDEN BERDASARKAN PASAL 169 HURUF (t) UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Januari 2024

Penulis


(R. Muhammad Ibrahim)

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Syarat Pendidikan Calon Presiden Berdasarkan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang ditinjau dari perspektif yuridis dan *fiqh siyāsah*. Topik ini menarik untuk diteliti karena masyarakat menginginkan sosok Presiden yang ideal. Keinginan tersebut kemudian terwujud melalui adanya sebuah syarat yang ditetapkan untuk memilih para calon Presiden yang sesuai dengan kualifikasi-kualifikasi yang telah ditetapkan. Namun, salah satu syarat tersebut yaitu mengenai pendidikan telah beberapa kali mendapatkan perdebatan akan penetapannya. Oleh karena itu skripsi ini ditulis untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana *ratio legis* syarat minimal pendidikan calon Presiden berdasarkan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum? dan Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap syarat pendidikan calon Presiden berdasarkan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode *library research/literatur review* dan kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu *siyāsah*. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan deskriptif deduktif yang kemudian akan disusun dengan sistematis sehingga menjadi bahan hukum yang konkrit berkaitan dengan Syarat Pendidikan Calon Presiden Berdasarkan Hukum Positif dan *fiqh siyāsah*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari *pertama*, alasan rasional dari perumusan syarat pendidikan untuk calon Presiden pada pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti politik, sosiologi, dan yuridis. *Kedua*, dari pandangan *fiqh siyāsah*, syarat pendidikan bagi pemimpin tidak disebutkan secara tegas, selain itu para ulama memiliki kriteria yang mereka tetapkan sendiri dalam memandang pemimpin. Artinya, *fiqh siyāsah* memberikan kelonggaran atas penetapan kriteria sosok pemimpin.

Selaras dengan hasil yang telah ditemukan maka penulis menyerankan, sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif dapat meninjau dan melakukan kajian ulang terhadap materi muatan atas syarat calon Presiden pada Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk terus berusaha mengembangkan diri melalui proses pendidikan dan lebih selektif dalam memilih pemimpin yang ideal.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KONSEP PEMIMPIN MENURUT <i>FIQH SIYĀSAH</i> DAN TEORI KEPEMIMPINAN	23
A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	23
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	23
2. Ruang Lingkup Kajian <i>Fiqh Siyāsah</i>	26
3. <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i>	28
4. Pemimpin Dalam <i>Fiqh Siyāsah</i>	31
5. Kepemimpinan Berdasarkan Sifat Rasulullah.....	33
6. Kriteria Pemimpin dalam <i>Fiqh Siyāsah</i>	37

B. Teori Kepemimpinan.....	42
1. Teori Kepemimpinan Genetis	43
2. Teori Kepemimpinan Lingkungan	44
BAB III SYARAT PENDIDIKAN UNTUK CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.....	45
A. Pemilihan Umum di Indonesia	45
B. Tujuan Pemilihan Umum.....	49
C. Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia	51
D. Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.....	56
E. Argumentasi Mengenai Penetapan Syarat Pendidikan Untuk Calon Presiden Dalam Masa Persidangan Pembentukan Undang-Undang Pemilihan Umum..	61
BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP SYARAT PENDIDIKAN CALON PRESIDEN BERDASARKAN PASAL 169 HURUF r UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017	71
A. Analisis <i>Ratio Legis</i> Syarat Pendidikan Calon Presiden Pasal 169 Huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	71
B. Analisis <i>Fiqh Siyāsah</i> Tentang Syarat Pendidikan Calon Presiden Pasal 169 Huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	80
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perubahan Syarat Calon Presiden Pada Tiap Undang-Undang Pemilu di Indonesia	59
Tabel 2. Kategori Syarat Utama dan Tambahan Bagi Calon Presiden	75
Tabel 3. Syarat Pemimpin Menurut Fiqh Siyāsah	84



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- antaranews.com. "Polemik Seputar Syarat Sarjana bagi Capres." Antara News, March 30, 2008. <https://www.antaranews.com/berita/97924/polemik-seputar-syarat-sarjana-bagi-capres>.
- Arifianto, Achmad Nur. "Pengaturan Syarat Minimal Pendidikan Kepala Desa." Skripsi, Universitas Jember, 2018.
- Arumaningsih, Nita. "Syarat Beragama Islam Bagi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Pandangan Shuriyah PWNU JATIM Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. <http://digilib.uinsa.ac.id/38918/>.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*. Jakarta: Matahari Masa, 1976.
- Basyar, Abdul. "Pentingnya Peran Pemimpin Dalam Permasalahan Sosial." *An-Nidhom: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 01 (2016): 1–16.
- Cahyono, Habib. "Peran Mahasiswa di Masyarakat." *De Banden-Bode: Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi* 1, no. 1 (2019): 32–43.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." Accessed September 7, 2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyāsah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah)*. Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Hamid, Abdul. "Nazhariyyatal-Fiqihal-Siyasidalam Memilih Pemimpin Pemerintahan Dan Negara Menurut Al-Mawardi." *Adliya* 9, no. 1 (2015): 85–98.
- Hamzah, Amir. "Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy)." *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan* 10, no. 2 (December 28, 2018): 13–27. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v10i1.259>.
- Herlambang, Dr H Saifuddin. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Quran: Sebuah Kajian Hermeneutika (Meluruskan Salah Paham tentang Memilih, Mematuhi, dan Mema'zulkan Pemimpin)*. 1st ed. Pontianak: AYUNINDYA, 2018.
- Hidayat, Asep. "Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat." *POLITICON : Jurnal Ilmu Politik* 2, no. 1 (March 2020): 61–74.
- "HR. Abu Daud No. 2242." Accessed September 12, 2023. <https://hadits.in//abudaud/2242>.
- Hutahaean, Wendy Sepmady. *Teori Kepemimpinan*. 1st ed. Malang: Ahlimedia Press, 2021.

- Indonesia, Forum Mahasiswa Pascasarjana. “Wacana Indonesia: Jurnal Pemikiran Mahasiswa Pascasarjana se-Indonesia.” *Komisi Pemilihan Umum* 1, no. 1 (2005): 1–61.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Jailani, Imam Amrusi, Lailatul Nabila, and Hasan Ubaidillah. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Kementerian Dalam Negeri. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (2016).
- Khalaf, Abd. Wahab al-. *Al-Siyasah Wa al-Syariah*. Kairo: Dar Ansor, 1997.
- Kurniawan, Rizki, and Hestin Febbia Andriani. “Pentingnya Kualitas Pendidikan Sebagai Pembentukan Karakteristik Seorang Pemimpin Di Indonesia.” *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (July 30, 2021): 407–11. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.407-411>.
- L.man, Yovenska, and Olan Darmadi. “Karakteristik Pemimpin Dalam Islam.” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 2 (December 8, 2019): 150–62. <https://doi.org/10.29300/imr.v4i2.2829>.
- Mas’adah, Inayatul. “Kepemimpinan Dalam Pandangan Filsuf Arab (Studi Kitab Muqaddimah Karya Ibnu Khaldun).” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 20, no. 2 (December 30, 2021): 174. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v20i2.5441>.
- Matosim, Matosim. “Konsepsi Pemerintahan Islam Menurut Muhammad Yusuf Musa.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 1 (March 29, 2020): 141–65. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.1.141-165>.
- merdeka.com. “Kisah Nabi Harun, Saudara Yang Selalu Setia Menemani Dakwah Nabi Musa,” May 8, 2020. <https://www.merdeka.com/jabar/kisah-nabi-harun-saudara-setia-dakwah-nabi-musa-klm.html>.
- Mu’ammam, Ali. “Kualifikasi Pemimpin Dalam Tafsir Al-Azhar.” *Journal Of Islamic And Law Studies* 3, no. 2 (October 15, 2019). <https://doi.org/10.18592/jils.v3i2.3275>.
- Muhammad, Syaikh bin Shalih al-‘Ut aimin. *Politik Islam Ta’liq Siyarah Syar’iyah Ibnu Taimiyah*. Translated by Ajmal Arif, Lc. Jakarta: Griya Ilmu, 2009.
- Nasution, Latipah. “Pemilu dan Kedaulatan Rakyat.” *ADALAH* 1, no. 9 (2017): 83–84. <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i9.11323>.

- Nathaniel, Felix. "Kisah PDIP yang Menentang Syarat Capres Harus Sarjana." *tirto.id*. Accessed December 26, 2023. <https://tirto.id/kisah-pdip-yang-menentang-syarat-capres-harus-sarjana-glvN>.
- Perdana, Aditya, Pramono U. Tanthowi, Mada Sukmajati, and Indonesia, eds. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia, 2019.
- Prasetya, Resa Hendy. "Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Dari Fiqih Siyasah." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. <http://digilib.uinsa.ac.id/25109/>.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh siyāsah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- RI, Setjen DPR. "Database Arsip - Dewan Perwakilan Rakyat." Accessed November 13, 2023. <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/241>.
- . "Undang-Undang dan RUU - Dewan Perwakilan Rakyat." Accessed November 14, 2023. <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/50>.
- . "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Accessed November 8, 2023. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- Rodliyah, Siti. "Leadership Pesantren: Urgensi Pendidikan Dalam Menyiapkan Pemimpin Bangsa Berkualitas Dan Bermoral." *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (July 16, 2019): 169–82. <https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-10>.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Rosana, Ellya. "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (January 5, 2016): 37–53. <https://doi.org/10.24042/tps.v12i1.827>.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. 1st ed. Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Sakdiah, Sakdiah. "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 22, no. 1 (June 27, 2016): 29–49. <https://doi.org/10.22373/albayan.v22i33.636>.
- Setiawan, Dimas, and Mei Lenawati. "Peran dan Strategi Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Era Society 5.0." *RESEARCH: Computer, Information System &*

- Technology Management* 3, no. 1 (April 8, 2020): 1–7. <https://doi.org/10.25273/research.v3i1.4728>.
- Sidiq, Umar. “Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik Dalam Al-Quran Dan Hadits.” *Dialogia* 12, no. 1 (June 1, 2014): 127–41. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v12i1.305>.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- “Surat Thaha Ayat 29 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Accessed December 26, 2023. <https://tafsirweb.com/5271-surat-thaha-ayat-29.html>.
- Susilawati, Endang, Agustinasari Agustinasari, Achmad Samsudin, and Parsaoran Siahaan. “Analisis Tingkat Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMA.” *Jurnal Pendidikan Fisika Dan Teknologi* 6, no. 1 (2020): 11. <https://doi.org/10.29303/jpft.v6i1.1453>.
- “Tiga Fraksi Usulkan Presiden Berpendidikan Sarjana | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Accessed December 26, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=2344&menu=2>.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- . *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Yani, Muhammad. “Konsep Dasar Karakteristik Kepemimpinan Dalam Pendidikan Islam.” *Jurnal al-Hikmah* 3, no. 2 (2021).
- Zulfikar, Fahri. “Daftar Jurusan Kuliah 7 Presiden RI, Ada di Kampus Mana Saja?” *detikedu*. Accessed September 12, 2023. <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-6052564/daftar-jurusan-kuliah-7-presiden-ri-ada-di-kampus-mana-saja>.